

BAB III

KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai faktor determinan kedua yaitu kondisi ekonomi dan keamanan. Dalam konteks ini adalah kondisi ekonomi dan keamanan yang mendorong Indonesia pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap *upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*. Dengan demikian maka terdapat dua (2) sub-bab dalam pembahasan ini, *Pertama*, ekonomi, dalam hal ini melihat aspek kondisi ekonomi Indonesia yang pada akhirnya membuat Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap *upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*. *Kedua*, keamanan dan militer, pada hal ini meninjau aspek militer dan keamanan yang juga mendorong munculnya keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement*.

3.1 Kondisi Ekonomi Indonesia

Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. dimana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa Kemampuan ekonomi suatu Negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri Negara itu. Coplin juga menerangkan bahwa terdapat dua kriteria untuk menaksir kemampuan ekonomi suatu negara. *Pertama*, kapasitas produksi barang dan jasa; *Kedua*, Ketergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional (Coplin, 2003, pp. 115-20).

3.1.1 Kapasitas Produksi Barang dan Jasa

Dalam hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa penaksiran kapasitas ekonomi suatu Negara harus mencakup analisis tentang kemakmuran Negara tersebut, sejauh mana kekauaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan pola-pola pertumbuhan ekonominya (Coplin, 1992, p. 115). Dengan demikian maka penjelasan kapasitas dan pola ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia di masa Joko Widodo.

a. Nawacita dan Program Ekonomi Indonesia dibawah presiden Joko Widodo.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara dengan salah satu pasar terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar pula menjadikan Indonesia memiliki ekonomi yang besar. Dengan jumlah pasar yang besar menjadikan Indonesia memiliki PDB yang cukup besar. Dimana Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai angka sebesar US\$ 1,016 triliun (Putra, 2018), hal ini juga lah yang menjadi alasan Indonesia menjadi anggota Group 20 (G-20). Sementara itu dalam PDB perkapita, Indonesia memiliki jumlah sebesar US\$ 3.927 pertahun (Febriano, 2019). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan berpendapatan kelima tertinggi di Asia Tenggara. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga ditopang oleh penurunan angka pengangguran di angka 9.82% pada mei 2018 (Kusuma, 2018). Angka pengangguran ini mencapai yang terendah dalam sejarah Indonesia

Dengan kondisi ekonomi yang cenderung stabil, presiden Joko Widodo juga memiliki target ekonomi yang sangat ambisius, dimana menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pertahun. Meskipun demikian, dalam 4 tahun menjabat sebagai presiden, tidak tercapai target tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai rata-rata 5% per tahun. Meski target

pertumbuhan 7% tidak terpenuhi, hal ini bukan menjadi indikator kegagalan ekonomi di era presiden Joko Widodo (Rahardian, 2019). Justru presiden Joko Widodo meletakkan landasan besar dalam ekonomi Indonesia untuk jangka panjang. Manifestasi tersebut disebut dengan “*Nawacita*”.

Program tersebut ditujukan untuk meletakkan dasar perekonomian Indonesia yang kuat. Program ekonomi presiden Joko Widodo dituangkan dalam “*Nawacita*” atau sembilan program prioritas. Kesembilan program prioritas adalah : *Pertama*, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; *Kedua*, Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; *Ketiga*, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; *Keempat*, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; *Kelima*, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; *Keenam*, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; *Ketujuh*, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; *Kedelapan*, melakukan revolusi karakter bangsa; *Kesembilan*, memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Kompas, 2014).

Dalam *nawacita* juga terdapat tiga fokus utama, yaitu Infrastruktur, Pembangunan Manusia dan Kebijakan Deregulasi Ekonomi. Dalam poin pertama yaitu infrastruktur, Indonesia membutuhkan dana besar untuk merealisasikan visi tersebut. Sementara itu dalam poin ketiga yaitu kebijakan deregulasi ekonomi, Indonesia juga berusaha meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 4 tahun Indonesia telah berhasil meningkatkan peringkat dalam indeks daya saing, dimana pada tahun 2016-2017 berada di peringkat 41, berhasil naik ke peringkat 36 di tahun 2018 (Edi, 2018). Sementara itu dalam bidang kemudahan bisnis dan

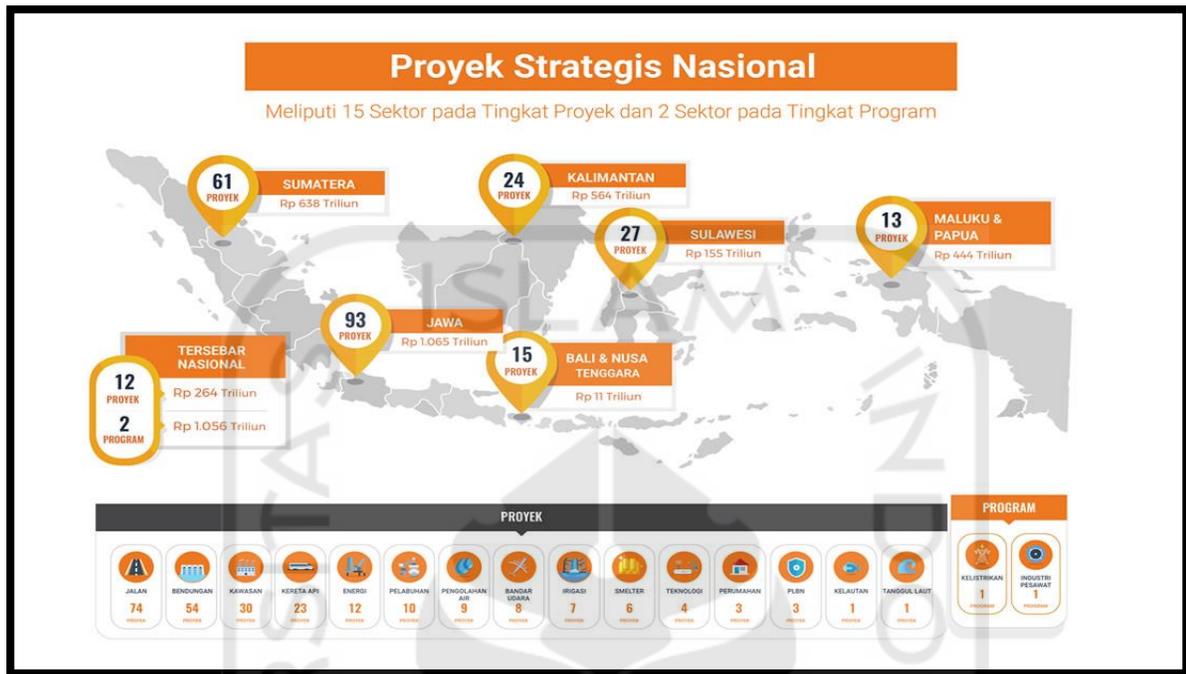
investasi Indonesia berada pada peringkat 72 pada tahun 2017 (Edi, 2018). Capaian-capaian ini juga diselingi dengan kenaikan GDP Indonesia, di mana pada Rp. 14.837,4 Triliun pada tahun 2018 (Anggit I. , 2019).

Meskipun pencapaian-pencapaian telah dicapai, namun tujuan Indonesia tidak berhenti pada titik tersebut. Dalam roadmap yang telah ditentukan, direncanakan bahwa terdapat dua fase yang akan dilakukan oleh Indonesia apabila Joko Widodo menjabat sebagai presiden Indonesia. *Pertama*, infrastruktur, seperti yang telah disebutkan dalam nawacita dan fokus pembangunan ekonomi sebelumnya. Program ini akan menentukan perkembangan ekonomi kedepan; *Kedua*, human capital development, di mana hal ini adalah pengembangan sumber daya manusia Indonesia agar mampu terserap dalam dunia kerja.

Tentu pada masa periode pertama yang berlangsung pada tahun 2014-2018, fokus Indonesia masih dalam membangun infrastruktur-infrastruktur dasar. Dalam gambar 3.1 dapat dilihat proyek-proyek infrastruktur nasional yang sedang dibangun oleh Indonesia.

Proyek Infrastruktur Nasional

Gambar 3.1



Sumber : (kppip.go.id, n.d.)

Dengan adanya rancangan proyek-proyek infrastruktur nasional tersebut, tentunya Indonesia tidak dapat menggunakan mekanisme pendanaan APBN untuk membiayainya semuanya. Namun juga untuk melibatkan unsur asing baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut. Diketahui pula bahwa investor-investor asing berasal dari Asia Tenggara seperti Singapura yang menjadi investor terbesar di Indonesia, serta Tiongkok yang menjadi investor ketiga terbesar di Indonesia. Dengan mengetahui bahwa Tiongkok dan ASEAN merupakan dua aktor yang secara signifikan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Apabila Indonesia tidak segera melakukan ratifikasi terhadap upgrading protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015, maka juga akan berdampak bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Diantara aspek yang terdampak apabila tidak dilakukan ratifikasi terhadap protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement adalah

bidang e-commerce, dimana Indonesia tidak dapat menikmati akses investasi berasal dari Tiongkok ke Indonesia.

3.1.2 Kebergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional

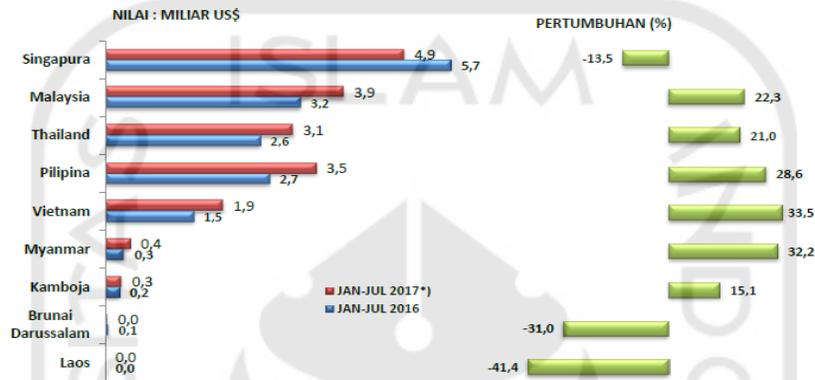
Dalam hal ini William D. Coplin menjabarkan bahwa kemandirian dan ketergantungan dalam bidang finansial seperti neraca pembayaran, investasi berpengaruh dalam pengambilan kebijakan (Coplin, 2003, p. 124). Dalam era modern, perdagangan antar berbagai negara di dunia sudah sangat kompleks. Kompleksitas perdagangan di era modern telah mendorong adanya interpedensi antara berbagai negara di dunia. Hal ini juga yang mendorong dijadikannya faktor kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional sebagai salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu negara.

Indonesia dalam hal ini merupakan negara yang sedang melakukan pengembangan ekonomi dari dasar. Dimana proyek infrastuktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia. Pada konteks ini, keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015 karena di dorong oleh adanya ketergantungan Indonesia dalam bidang perdagangan terhadap ACFTA. Dalam mengukur kebergantungan Indonesia terhadap ACFTA, maka dilihat dari neraca perdagangan yang terdiri dari ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia dengan partner kawasan perdagangan bebas lainnya. Dalam hal ini ini ACFTA merupakan mekanisme perdagangan bebas yang secara besar berkontribusi dalam pemanfaatan preferensi tarif. Dalam grafik III.1 dapat dilihat perbandingan impor yang dilakukan oleh Indonesia dengan preferensi tarif dengan partner banyak FTA.

Selain impor, negara-negara partner ACFTA juga merupakan tujuan ekspor Indonesia dengan jumlah yang besar. Pada tahun 2016 dan 2017 (Juni-Juli) saja negara-negara anggota ASEAN menjadi tujuan ekspor yang besar bagi Indonesia. Presentase tersebut dapat dilihat pada grafik

III.1, dimana menunjukan Singapura menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, disusul oleh Malaysia, Thailand, Filipina. Hal ini menunjukan bahwa pasar ASEAN merupakan tujuan utama Indonesia.

Grafik 3.1
Nilai Ekspor Non-Migas ke ASEAN

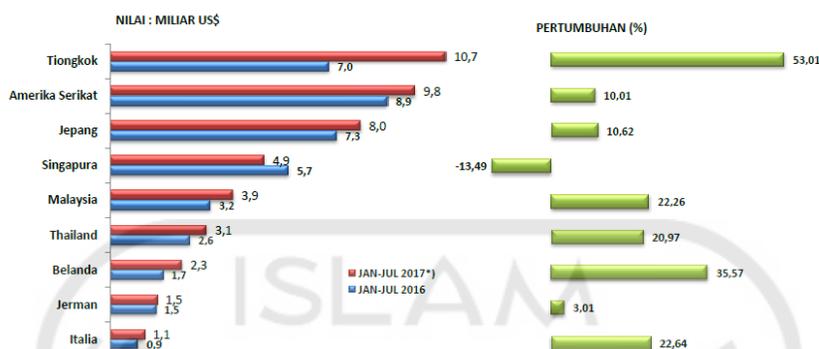


Sumber : (Kurniawan, 2018, p. 26)

Sementara itu dalam pangsa ekspor non-ASEAN, Tiongkok merupakan negara yang menjadi tujuan ekspor-impor Indonesia. Disamping Tiongkok juga terdapat Jepang dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Meskipun demikian terdapat kedekatan yang semakin dekat antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang perdagangan. Pada dalam grafik III.2 dapat dilihat nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara non-ASEAN.

Grafik 3.2

Nilai Ekspor Indonesia ke Negara non-ASEAN



Sumber : (Kurniawan, 2018, p. 29)

Ekspor terbesar Indonesia pada tahun 2017, terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 34,10% (Lavinda, 2018). Angka ini naik pada pertengahan Juli 2018 sekitar 19,33%, sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan (Kusuma, 2017). Dalam sektor non-migas, ekspor Indonesia didominasi oleh CPO, bahan bakar mineral dan lemak hewan nabati (Lavinda, 2018). Sementara itu dalam bidang impor, Tiongkok merupakan mitra impor terbesar bagi Indonesia (Rifka, 2018). Produk elektronik masih mendominasi produk yang di impor oleh Indonesia dari Tiongkok. Impor dari Tiongkok menjadi 27,30% pada tahun 2018. Dengan demikian angka-angka yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan terhadap mitra negara-negara ACFTA.

Ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara partner ACFTA juga dipengaruhi oleh adanya hak-hak khusus yang didapat dari perjanjian dagang ini. di antara hak khusus tersebut adalah adanya “*preferential tariff*” dalam bidang impor maupun ekspor. Dari semua perjanjian perdagangan bebas yang di ikuti oleh Indonesia, ACFTA merupakan perjanjian dagang yang hak khusus “*preferential tariff*” dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dari grafik III.3 dapat dilihat

bahwa sejak tahun 2013 hingga Januari 2018, ACFTA berada di peringkat atas dari semua mekanisme “*preferential tariff*” dalam bidang impor. Sementara itu mekanisme ACFTA dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia dalam bidang ekspor. Pada tabel III.1 dapat negara-negara ACFTA menjadi tujuan utama ekspor Indonesia. Kemudahan ekspor ini dikarenakan adanya hak-hak khusus yang dapat dimanfaatkan Indonesia seperti preferensi tarif. Besaran yang diindikasikan bahwa terdapat ketergantungan yang cukup signifikan antara Indonesia dengan negara-negara ACFTA. Maka dengan tidak melakukan ratifikasi terhadap ACFTA akan terjadi kerugian yang besar, salah satunya dalam preferensi tarif dan tidak mendapatkan “*Rules of Origin*”

Dalam sektor investasi, juga ACFTA meningkatkan angka investasi Tiongkok ke Indonesia. Pada implementasi 2009 terjadi kenaikan rata-rata 40 juta dollar AS per tahun pada rentang waktu 2005 hingga 2009. Angka ini naik dibandingkan dengan investasi Tiongkok ke Indonesia sebelum adanya ACFTA pada periode 2000 hingga 2004 (Kompas, 2010). Kenaikan juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya USD 100 milyar pada 2011, 2012, USD 300 milyar pada 2013. Juga pada 2016, dimana terdapat kenaikan drastis investasi Tiongkok di Indonesia sebesar USD 2.7 juta (Tempo, 2016). Meskipun demikian di 2018 terdapat penundaan realisasi investasi besar-besaran Tiongkok di Indonesia. Meskipun pada akhirnya mengalami peningkatan investasi Tiongkok di Indonesia pada 2019. Hal ini menempatkan Tiongkok masuk kedalam jajaran tiga investor terbesar di Indonesia di tahun 2018 (Okezone, 2018). Dengan demikian diketahui juga bahwa terdapat ketergantungan Indonesia pada Tiongkok dalam bidang penanaman modal (*investasi*).

3.2 Kemampuan Militer Indonesia

Pada hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, 1992, p. 124). Pada sub-bab ini dibahas mengenai aspek kondisi keamanan Indonesia, yang mendorong Indonesia pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*. Dengan demikian terdapat dua pembahasan yang akan dibahas dalam sub-bab ini, yang pertama adalah tantangan keamanan yang muncul karena tidak dilakukannya ratifikasi terhadap *protocol to amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*, dan kemudian mengenai kemampuan militer atau pemegang otoritas keamanan dalam mengamankan potensi ancaman keamanan tersebut.

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

3.2.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, 1992, p. 124). Indonesia merupakan salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam anggaran belanja pertahun negara (APBN) 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana kepada sektor pertahanan dengan jumlah sebesar Rp. 107 triliun. Besaran ini membuat anggaran pertahanan menjadi sektor penerima alokasi APBN terbesar kedua setelah alokasi dana untuk infrastruktur. Selain menjadi negara dengan anggaran pertahanan yang besar, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang cukup kuat di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 3.1: Alokasi APBN Untuk Bidang Pertahanan

No.	Tahun	Alokasi Anggaran
1.	2015	Rp. 105,9 T
2.	2016	Rp. 108,7 T
3.	2017	Rp. 120,0 T
4.	2018	Rp. 107, 6 T
5.	2019	Rp. 108,4 T

Sumber : (Antaraneews, 2019)

Selain memiliki anggaran pertahanan yang cukup besar, Indonesia juga memiliki angkatan bersenjata yang terdiri dari tiga (3) korps, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Selain itu tugas pengamanan juga dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Secara kuantitas, jumlah tentara Indonesia berjumlah 676.200 personel. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkuat keempat di Asia (Tempo, 2016). Selain itu juga dibantu oleh aparat kepolisian yang berjumlah 430.000 personel (Jaya, 2016). Dengan angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah personel polisi terbanyak di dunia. Dengan adanya jumlah personel yang besar ini maka akan mendukung adanya pengamanan terhadap ancaman yang muncul.

3.2.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 2003, p. 126]). Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan wilayah territorial yang sangat luas,

serta memiliki salah satu personel militer dan keamanan terbesar di dunia. Tentu, hal tersebut mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mengandalkan impor senjata atau alutista dari luar negara. Pada tahun 2018, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara importer senjata terbesar ke sepuluh di dunia (Muhaimin, 2018). Angka ini juga di ikuti dengan kelonjakan impor senjata sebesar 677% di awal 2018. Dengan total nilai sebesar US\$ 39 juta menjadi US\$ 15,1 miliar atau 0,26 persen dibandingkan Desember 2017 (Praditya, 2018).

Dari angka impor tersebut, impor senjata Indonesia terbanyak berasal dari Tiongkok (648 unit), Inggris (505 unit) dan Amerika Serikat (462 unit). Adapun belanja persenjataan tersebut dialokasikan terhadap tiga korps dalam tentara nasional Indonesia. Angkatan Laut mendapatkan alokasi 39,7%, (977 unit) Angkatan Darat sebanyak 45,5% (1,118 unit). Sementara itu alutista yang paling banyak diimpor Indonesia adalah C-705, Starstreak, FGM-148 Javelin, AGM0114K Hellfire, dan Mistral (Hartiani, 2016).

Meskipun menjadi negara dengan tingkat impor yang besar, setidaknya Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutista secara mandiri. Diantara beberapa alutista yang dikembangkan oleh Indonesia adalah sebagai berikut; *Pertama*, kendaraan tempur seperti panser dan tank, melalui PT Pindad dan beberapa perusahaan nasional lain, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan tempur secara mandiri seperti Panser Anoa dan Tank Harimau (Katadata, 2018). Dalam perkembangannya bahkan Indonesia telah mampu untuk di ekspor ke luar negeri seperti Panser Anoa yang diekspor Brunei Darussalam dan Bangladesh; *Kedua*, pengembangan jet tempur bersama dengan Korea Selatan (Detik, 2018); *Ketiga*, melakukan ekspor kapal perang ke Filipina; *Keempat*, pengembangan kapal selam bersama Korea Selatan dengan adanya transfer teknologi (Kompas, 2019); *Keenam*, mampu memproduksi amunisi dan senjata senjata laras panjang dan otomatis oleh PT Pindad (Pindad, 2018). Dengan kemampuan-kemampuan ini, maka

menunjukkan bahwa Indonesia dapat secara mandiri dalam bidang alutista meskipun juga dibarengi dengan impor senjata.

3.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer

Indikator ketiga seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan militer tersebut berfungsi (Coplin, 2003, p. 128). Dalam penelitian ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dimana terdapat sekitar 250 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga merupakan multi-agama dan multi-etnis, bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah etnis terbanyak di dunia. Dengan keanekaragaman ini, tentu memungkinkan terjadinya gesekan dalam masyarakat. Hal kestabilan internal maka terdapat beberapa hal yang mengancam stabilitas keamanan internal Indonesia. diantara ancaman-ancaman yang ada adalah sebagai berikut;

Pertama, ancaman konflik domestik, hal ini berupa konflik yang melibatkan kesukuan dan agama dan pemberontakan. Diketahui bahwa dalam sejarah Indonesia terdapat konflik yang melibatkan kesukuan dan agama, seperti di Ambon dan Poso. Potensi munculnya konflik primordial di Indonesia sangat tinggi karena beragamnya etnis. Selain itu Indonesia juga masih menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua yang mana terakhir melakukan pembunuhan terhadap 40 pekerja jalan Trans Papua, dengan demikian potensi ancaman masih terbuka lebar (BbcIndonesia, 2018); *Kedua*, ancaman terorisme, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi tempat tujuan serangan kelompok teroris baik lokal seperti JAD maupun transnasional seperti ISIS. Terorisme lokal merupakan kelompok teror yang memiliki jaringan dari dalam negeri Indonesia, dimana seperti kelompok teroris lokal JAD yang melakukan

serangan terhadap beberapa gereja di kota Surabaya pada tahun 2018. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia masih menjadi target serangan utama kelompok teroris lokal.

Selain itu terdapat ancaman terorisme transnasional, diantaranya adalah kehadiran jaringan ISIS yang berada di Asia Tenggara termasuk di Indonesia dan Filipina. Kelompok-kelompok ini merupakan seperti Abu Sayyaf dan MIT merupakan cabang dari ISIS yang berada di Asia Tenggara. Kehadiran mereka juga merupakan ancaman nyata bagi Indonesia. Terlebih pada tahun 2015 kelompok ISIS mendeklarasikan perang terhadap Indonesia. Pada tahun 2017 juga ISIS kembali mengancam untuk menyerang Indonesia. Maka tentu hal tersebut menjadi ancaman yang besar bagi kestabilan internal Indonesia (Straittimes, 2016).

Ketiga, ancaman agresi negara asing, Indonesia dihadapkan pada beberapa agresi yang dilakukan oleh negara asing, diantara negara yang melakukan agresi terhadap Indonesia adalah Tiongkok. Perkembangan terkini di Laut Tiongkok Selatan telah melibatkan Indonesia dalam klaim tumpang tindih di wilayah tersebut. Dimana Tiongkok melakukan klaim terhadap laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Indonesia (BbcIndonesia, 2017). Tiongkok melakukan manuver militer di Laut Tiongkok Selatan, dimana juga melakukan pembangunan pulau buatan untuk keperluan militer di Laut Tiongkok Selatan. Pulau-pulau buatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan diisi dengan berbagai alutista perang seperti pangkalan udara, stasiun tentara dan pelabuhan perang laut (Economist, 2018). Tidak jarang pula manuver militer tersebut juga digunakan untuk melakukan intimidasi terhadap Indonesia. Hal ini seperti aksi yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok yang melakukan intimidasi terhadap KRI Imam Bonjol saat sedang melakukan penangkapan kapal Tiongkok illegal di laut Natuna Utara (Simanjuntak, 2016). Pelanggaran wilayah laut yang kerap dilakukan oleh Tiongkok merupakan hasil dari klaim Tiongkok yang juga mencangkup laut Natuna Utara. Dengan demikian pelanggaran kerap terjadi

dan dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara. Meskipun demikian, dinamika hubungan militer Indonesia-Tiongkok sangatlah dinamis, di sisi lain Indonesia sangat bergantung pada alutista Tiongkok. Pada tahun 2016, Indonesia impor senjata terbesar Indonesia berasal dari Tiongkok dengan total pembelian 648 unit (Hartiani, 2016). Dengan demikian maka hubungan Indonesia-Tiongkok dalam bidang militer memiliki dua sisi yang cukup berbeda, sisi pertama menampilkan Tiongkok sebagai ancaman kedaulatan Indonesia. Sementara sisi lain menunjukkan Tiongkok sebagai pemasok senjata bagi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia.

Selain Tiongkok, potensi ancaman lain juga berasal dari Australia, dimana diketahui bahwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia disebabkan karena intervensi dari Australia. Potensi ancaman tersebut dapat terulang mengingat Australia terhadap wilayah kedaulatan Indonesia di Papua. Mengingat terdapat beberapa elemen masyarakat Australia yang mendukung gerakan separatisme Papua seperti Partai Hijau (*Green Party*) di Parlemen Australia (Green Party, 2018). Selain itu Indonesia juga memiliki beberapa sengketa perbatasan dengan beberapa negara termasuk Malaysia (Wiryo, 2010). Yang mana apabila tidak dicermati dengan baik maka akan menimbulkan ancaman bagi kestabilan domestik Indonesia.

Dengan ancaman-acaman diatas, dapat memicu ketidakstabilan internal Indonesia, meskipun demikian, Indonesia memiliki jumlah Tentara terbanyak pertama di Asia Tenggara. Selain itu juga ditunjang dengan kepolisian yang juga memiliki personel yang berkualitas dan handal. Dengan demikian ancaman-ancaman yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas Indonesia dapat diatasi, oleh karena itu dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi Indonesia yang aman ini juga dipertegas dengan temuan The Gallup Law and Order yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling aman kesembilan di dunia (Putra, 2018)